

ABSTRAK

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA MENGENAI DIRI SUAMI DALAM HUKUM PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan tersebut terkadang terhalang oleh keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, seperti apabila suami istri semula non muslim, tiba-tiba suami masuk Islam dan istri menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dibatalkan sebab laki-laki muslim hanya diizinkan kawin dengan perempuan non muslim apabila termasuk ahli kitab. Peristiwa pembatalan perkawinan tersebut kita jumpai dalam masyarakat, misalnya seperti yang terjadi pada pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Depok, dalam Putusan Nomor : 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : bagaimana pelaksanaan pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka mengenai diri suami dan/atau istri dalam prakteknya di Pengadilan Agama, dan bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan dalam hal adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Socio Legal*. Pendekatan tetap dalam ranah hukum, hanya perpektifnya yang berbeda. Jenis data yg digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian kasus gugatan pembatalan perkawinan yang diakibatkan berpindahnya agama (murtad) dari salah satu pihak suami/ isteri setelah perkawinan berjalan lebih tepat dinyatakan sebagai perceraian karena setelah berlangsungnya perkawinan maka berlakulah hukum Islam, dimana apabila terjadi murtadnya salah satu pihak baik isteri maupun suami maka putuslah perkawinan tersebut, dan akibat hukumnya mengenai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau isteri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta, dan pihak ketiga.

Saran : Pemerintah harus menegaskan dalam peraturan yang sifatnya lebih khusus (*lex specialist*) mengenai klasifikasi perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak didalam lembaga perkawinan. Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil harus berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap calon pasangan dan calon harus memperdalam agama yang dianutnya agar mengetahui tujuan dari perkawinan yang sesungguhnya.

Kata Kunci : *Pembatalan Perkawinan, Penipuan atau Salah Sangka.*

ABSTRACT

MARRIAGE ANNULMENT DUE TO FRAUD OR MISUNDERSTANDING ON HUSBAND CONDITION IN MARRIAGE LAW AND ITS LEGAL CONSEQUENCES

Human perform weddings to create peace, creates a feeling of love between husband and wife, and their children in order to form a happy family and eternal. But the goal is sometimes obstructed by circumstances not previously imagined, such as when a husband and wife originally non-muslim, suddenly the husband converted to Islam and the wife refused to convert to Islam, then their marriage is canceled because Muslim men are only allowed to marry non-muslim women if including scribe. The marriage annulment is encountered in society, such annulment in Depok Religious Court, in its Decision Number: 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

Problems in this study can be formulated as follows:

how the implementation of marriage annulment due to fraud or misunderstanding on husband and/or wife condition in practice in the Religious Court, and how legal consequences that arise with marriage annulment in the event of fraud or ding on husband condition.

This study uses Socio Legal approach. The approach remains in legal aspect, just a different perspective. Type of data that is used in this study is secondary and primary data. The analysis used in this study is qualitative data analysis.

Case study results of marriage annulment as a result of religion conversion (apostasy) from one of the husband/wife after marriage precisely expressed as divorce because after the marriage then Islamic law shall enforce, which occurs when one party perverted either the wife or the husband then the marriage is broken up, and the legal consequences on children from the marriage, husband or wife are acting in good faith, except for property, and third party.

Suggestion: The government should assert in more spesific regulations (lex specialist) regarding the classification of acts that can harm the parties within the marriage institution. Office of Religious Affairs and Civil Registry should play an active role in fostering and supervision of bride and candidates should deepen their religion in order to know the real purpose of marriage.

Keywords: *Marriage Annulment, Fraud or Misunderstanding.*